

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama abad ke-20, bendungan telah menjadi bagian penting dari ekonomi global. Bendungan besar muncul sebagai salah satu alat yang paling penting dan nyata untuk pengelolaan sumber daya air. Lebih dari 45.000 bendungan besar di seluruh dunia telah memainkan peran penting dalam membantu masyarakat dan ekonomi dengan memanfaatkan sumber air untuk produksi pangan, pembangkit energi, pengendalian banjir dan penggunaan rumah tangga. Di Asia Tenggara, secara total 58 bendungan besar telah dibangun di Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam, dengan lebih 52 bendungan dalam tahap perencanaan (Bui dan Schreinemachers, 2011).

Meskipun bendungan memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan memenuhi pasokan energi dunia secara berkelanjutan, telah terjadi perdebatan publik tentang biaya dan manfaat yang menyertai proyek ini (Bartle, 2002). Pembangunan bendungan dalam banyak kasus telah menyebabkan perpindahan paksa dan pemukiman sekitar 40-80 juta orang di seluruh dunia (Robinson, 2003; Bui *et al.*, 2011; WCD, 2000). Bendungan menyebabkan biaya lingkungan dan sosial yang jauh lebih besar daripada manfaat yang diberikan bendungan kepada masyarakat (McCully, 2001; Stone, 2011; WCD, 2000). Kekhawatiran dikemukakan mengenai dampak sosial yang dapat disebabkan. Dampak yang ditimbulkan antara lain hilangnya mata pencaharian, hilangnya tempat tinggal, hilangnya fasilitas kesehatan dan pendidikan, terganggunya pola kekerabatan, perubahan sistem nilai dan perubahan budaya.

Pemindahan paksa penduduk untuk tujuan kemajuan ekonomi melalui proyek-proyek pembangunan mengacu pada konsep yang lebih luas *Development-Induced Displacement and Resettlement* (DIDR). Secara global, pemindahan penduduk akibat pembangunan dan pemukiman kembali terjadi pada skala besar, menggusur sekitar 10 juta orang setiap tahun (Bisht, 2009). Pemindahan paksa lebih dari sekedar relokasi

fisik orang; memiliki potensi untuk menghancurkan kehidupan masyarakat secara ekonomi, fisik, budaya dan sosial, menyebabkan pemiskinan generasi sekarang dan masa depan (Maldonado, 2012). Pemindahan bukan dengan sukarela dapat dilihat sebagai salah satu jenis guncangan eksternal (Bui *et al.*, 2012).

Beberapa penelitian melaporkan bahwa DIDR menyebabkan dampak negatif pada standar hidup dan hasil-hasil penghidupan masyarakat yang dipindahkan. DIDR mempengaruhi mereka yang paling rentan dalam masyarakat dan dapat menyebabkan pemiskinan mereka (Cernea, 2003; Bui *et al.*, 2011). Perpindahan yang disebabkan pembangunan meningkatkan kerentanan orang untuk risiko tertentu, termasuk petani tanpa lahan, pengangguran, tunawisma, marginalisasi, kerawanan pangan, peningkatan mortalitas dan morbiditas, hilangnya akses ke properti umum dan disintegrasi sosial (Cernea, 2000). Sejumlah besar cendekiawan dan aktivis mempertanyakan proyek-proyek pembangunan yang menggusur, meminggirkan dan memiskinkan ribuan orang miskin (Fernandez dan Thukral 1989; Kothari, 1996; Thukral, 1992). Pemindahan penduduk akibat pembangunan menyebabkan gangguan sosial ekonomi dan budaya cukup besar dan kerugian untuk individu dan komunitas (Dreze *et al.*, 1997; Dwivedi 1999; Morse *et al.*, 1992; Parasuraman, 1993; Thukral, 1992; Scudder, 1993; Oliver-Smith, 1991; WCD, 2000).

Efek dari pemukiman kembali pada masyarakat pengungsi dapat mencakup hilangnya aset fisik dan aset non-fisik, termasuk: rumah, komunitas, lahan produktif, aset penghasil pendapatan dan sumber, subsisten, sumber daya, situs budaya, struktur sosial, jaringan kerja dan ikatan, dan identitas budaya (Downing, 2002). Memburuknya standar hidup yang disebabkan oleh pembangunan bendungan berupa hilangnya aset-aset produktif, kurangnya akses ke pasar dan kesempatan kerja, dan gangguan jaringan sosial yang ada dalam masyarakat (Cernea dan Schmidt-Soltau, 2006; Webber dan McDonald, 2004). Oleh karena itu, pemukiman kembali secara signifikan meningkatkan risiko memiskinkan penduduk setempat, mengancam penghidupan mereka dan mengosongkan peluang mereka untuk pembangunan berkelanjutan.

Faktor penting yang mempengaruhi rehabilitasi pengungsi adalah karakteristik aset dari lima modal penghidupan penting sebelum dan setelah pemukiman kembali, termasuk alam, manusia, fisik, finansial, dan modal sosial (Blaikie *et al.*, 1994; Chambers, 1995; Chambers dan Conway, 1992; De Haan, 2000). Rumah tangga yang memiliki lahan dan sumber daya alam lainnya bisa menerima kompensasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu mereka memulai pemukiman kembali dalam keadaan yang lebih baik daripada yang lain (Karimi dan Taifur, 2013). Akibatnya, pemukiman kembali mungkin menghasilkan baik pemenang dan pecundang (Fujikura dan Nakayama, 2013).

Narayan *et al.*, (2000) dalam studi mereka mengenai "suara masyarakat miskin", menemukan bahwa orang miskin jarang berbicara tentang pendapatan, tetapi berfokus pada pengelolaan aset-fisik, manusia, sosial dan lingkungan-sebagai cara untuk mengatasi kerentanan mereka. Akses dan kontrol atas aset, kepemilikan aset termasuk lahan dan ternak, rumah dan peralatan, dan sumber daya lainnya memungkinkan orang untuk membuat kehidupan yang stabil dan produktif. Meningkatnya hubungan kontrol atas aset juga berpotensi memungkinkan jalur yang lebih permanen keluar dari kemiskinan dibandingkan dengan langkah-langkah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan atau konsumsi saja.

Aset tidak merata antara orang kaya dan miskin, baik di tingkat nasional maupun di dalam masyarakat dan rumah tangga (Deere dan Doss 2006; Deere dan Diaz, 2011; Swaminathan *et al.*, 2011). Literatur empiris dari negara maju dan negara berkembang menunjukkan bahwa distribusi aset dalam rumah tangga sangat penting untuk kesejahteraan rumah tangga dan individu. Ini diukur dari aspek seperti keamanan pangan, gizi, dan pendidikan (Deere dan Doss, 2006; Quisumbing, 2003).

Guna memperjuangkan penghidupan yang berkelanjutan dan mengatasi kerentanan terkait ketersediaan lahan tersebut, mayoritas masyarakat yang bermatapencaharian sebagai petani dituntut melakukan strategi untuk penghidupannya. Strategi penghidupan menggambarkan upaya yang dilakukan masyarakat dalam mencapai penghidupan yang memadai. Strategi penghidupan berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengelola atau mengkombinasikan aset

penghidupan yang tersedia atau dimiliki, mensikapi perubahan yang terjadi, dan menentukan prioritas untuk mempertahankan atau memperbaiki penghidupan (Scoones, 1998; *Scale Up*, 2011).

Sustainable livelihood (SL) sebagai pendekatan pembangunan mencakup prinsip dan cara pandang serta analisis terhadap kondisi penghidupan masyarakat beserta faktor-faktor penting yang mempengaruhinya. Ashley dan Hussein (2000) menunjukkan bagaimana dampak pembangunan daerah biasanya diukur semata-mata menggunakan indikator uang tunai, peningkatan produksi dan ketersediaan lapangan kerja. Pendekatan penghidupan berfokus pada kehidupan masyarakat, bukan semata-mata sumber daya dan standar yang ditetapkan untuk output proyek. Fokus SL pada kesejahteraan dan bahwa, selain pendapatan, menggabungkan faktor-faktor seperti kerawanan pangan, inferioritas sosial, pengucilan, kurangnya aset fisik dan kerentanan. Selain itu, kemiskinan rumah tangga ditentukan oleh faktor-faktor seperti akses terhadap aset fisik dan pengaruh kebijakan dan lembaga.

Pendekatan *Sustainable livelihood* untuk menyelidiki dampak proyek terhadap pemukim kembali, telah digunakan oleh berbagai peneliti (McDowell (2002); Webber dan McDonald (2004); Chimvou dan Hulme (2006); McDonald (2006); Wilmsen *et al.*, (2011); Fernando (2010); Phonepraseuth (2012); dan Bui *et al.*, 2012). Sementara banyak pemerintah dan organisasi non pemerintah telah mengadopsi model penghidupan berkelanjutan, ada juga beberapa kritik terhadap pendekatan ini. Krishna (2012) mengidentifikasi dan mempromosikan kekuatan mata pencaharian yang berkelanjutan sebagai model pengembangan manusia di lingkungan internasional dan mengidentifikasi unsur-unsur yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dalam model SL yang mapan seperti pembangunan terkait gender.

Pembangunan bendungan PLTA sangat mempengaruhi mata pencaharian masyarakat dan masyarakat yang dipindahkan secara paksa. Meskipun beberapa studi mengakui perkembangan positif dalam komunitas pengungsi setelah dipindahkan (Agnes *et al.*, 2009; Nakayama *et al.*, 1999; Scudder, 2005), laporan mayoritas menklaim DIDR menyebabkan dampak negatif yang besar untuk orang-orang yang terkena dampak, bahkan jangka panjang (Gebre, 2003; Karimi dan Taifur,

2013; McDowell, 1996; Roy, 1999; Satyanarayan, 1999). DIDR menyebabkan kerusakan dalam kapasitas produksi, pendapatan, budaya, dan kesejahteraan (Bartolome, *et al.*, 2000; Cernea, 2003; Scudder, 1997; Ty *et al.*, 2014.; Wilmsen, 2011).

Dalam banyak kasus orang dimukimkan kembali ditinggalkan dengan sedikit tanah dan akses yang lebih buruk ke sumberdaya milik bersama dari sebelum pemukiman kembali atau sumber daya ini dari kualitas yang lebih rendah (Ty, 2008). Beberapa negara telah memukimkan pengungsi dari daerah pedesaan ke perkotaan, seperti dalam kasus Cina (Wilmsen, 2011) dan Indonesia (Yoshida *et al.*, 2013). Model ini mencoba untuk mengganti mata pencaharian pedesaan oleh ketenagakerjaan perkotaan, tetapi hasil-hasil penghidupan rumah tangga dipindahkan sering kali lebih miskin dari sebelum pemukiman kembali, mungkin karena orang tidak memiliki keterampilan, jaringan dan aset lainnya yang diperlukan untuk melakukannya dengan baik di lingkungan yang sangat berbeda (Wilmsen, 2011).

Ada pola pembangunan yang tidak adil dalam masyarakat yang disebabkan oleh rumahtangga yang berbeda mulai dari posisi yang berbeda dalam kekuasaan dan dukungan sumber daya. Oleh karena itu proses mobilitas sosial ke atas dan ke bawah yang kurang linear (Scoones dan Wolmer, 2002). Sejumlah besar orang pernah miskin, menjadi kaya, dan sebaliknya (Zoomers, 2010). Pada tingkat masyarakat dan rumah tangga, dampak perpindahan dan pemukiman kembali pada mata pencaharian sering berlangsung selama jangka waktu yang panjang. Setiap evaluasi jangka pendek hanya akan memahami dampak jangka pendek yang tidak mencerminkan perubahan jangka panjang .

B. Perumusan Masalah

Bendungan PLTA Koto Panjang terletak di Kecamatan XIII Koto Kampar merupakan proyek pembangkit listrik tenaga air dengan daya terpasang sebesar 114 MW. Pembangunan bendungan ditujukan untuk pemenuhan sumber energi listrik di wilayah tengah Sumatera, khususnya Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Bendungan

seluas 12.400 ha dibangun dengan jalan membendung aliran Sungai Kampar dan menyebabkan tenggelamnya sebanyak 10 buah desa (delapan desa di wilayah Propinsi Riau dan dua desa di wilayah Propinsi Sumatera Barat), sehingga penduduknya dipindahkan dari lokasi genangan ke pemukiman baru.

Kepemilikan lahan di lokasi pemukiman kembali menunjukkan gejala polarisasi. Transaksi jual beli lahan antar rumah tangga pada awal bermukim di pemukiman kembali disebabkan oleh kesulitan ekonomi yang dihadapi petani untuk memenuhi kebutuhan hidup. Produksi karet yang dihasilkan petani dari lahan perkebunan berkualitas rendah. Kesulitan ekonomi membuat sebagian petani menjual lahan mereka pada petani yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik. Petani yang tidak memiliki lahan melakukan usaha tani di lahan marjinal, sebagian mereka memanfaatkan lahan di lokasi pemukiman mereka sebelumnya yang tidak digenangi air waduk. Kondisi ini menunjukkan resiko yang dihadapi petani dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka cukup besar.

Hasil studi Akbar (2004) mengenai Dampak Pembangunan PLTA Koto Panjang terhadap Pengembangan Wilayah di Kecamatan XIII Koto Kampar, mengungkapkan proyek PLTA Koto Panjang menyebabkan terjadi penurunan pendapatan rata-rata masyarakat secara signifikan, yakni sebesar 9,37 persen. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan XIII Koto Kampar setelah adanya proyek bertambah sebesar 15,93 persen. Dampak proyek terhadap produksi pertanian padi menyebabkan terjadinya penurunan sebesar 47,95 persen, dan produksi jagung mengalami penurunan sebesar 21,84 persen.

Evaluasi awal pasca proyek bendungan PLTA Koto Panjang pada tahun 2004 menyatakan lebih dari 67,8% dari para pemukiman kembali dilaporkan memiliki kondisi hidup yang lebih buruk, hanya 18,2% dari para pemukiman kembali memiliki kondisi hidup yang lebih baik. Di antara yang terburuk adalah Pongkai Baru di Provinsi Riau dan Tanjung Pauh di Provinsi Sumatera Barat. Di dua desa tersebut, lebih dari 90% dari pemukiman menghadapi kondisi hidup yang lebih buruk. Pada dua desa, Koto Masjid dan Pulau Gadang di mana lebih dari 50% dari pemukiman kembali mengalami kondisi hidup yang lebih baik (JBIC, 2004).

Penelitian yang didasarkan pada sampel dari keluarga dari empat desa pemukiman di bendungan Koto Panjang pada tahun 2005 (Karimi *et al.*, 2005) mengungkapkan pemukim kembali yang tidak menerima kompensasi ditemukan di setiap desa, namun proporsinya berbeda di seluruh desa. Proporsi tertinggi pemukim kembali yang tidak menerima kompensasi terdapat di Pongkai Baru, proporsi terendah terdapat di Koto Masjid. Kompensasi moneter yang diterima oleh pemukim dimanfaatkan untuk berbagai alternatif. Di Desa Koto Masjid 42.9 % pemukim menggunakan uang kompensasi untuk membeli lahan, sedangkan di Desa Pongkai Baru hanya 16.7 % pemukim yang menggunakan uang kompensasi untuk membeli lahan.

Dari 10 sepuluh desa lokasi pemukiman kembali di wilayah bendungan Koto Panjang, Karimi dan Taifur (2013) melakukan penelitian di dua desa, yaitu Koto Mesjid di Provinsi Riau dan Tanjung Balik di Provinsi Sumatera Barat sebagai studi kasus. Pemilihan ini merupakan kinerja ekonomi yang baik (Koto Masjid) dan kinerja ekonomi yang buruk (Tanjung Balik) setelah pemukiman kembali. Lebih dari 80% dari penduduk desa dari setiap desa petani terlibat berusaha dalam perkebunan karet; Proporsi ini meningkat lebih lanjut setelah pemukiman kembali. Namun, perbedaan tingkat pendapatan antara dua desa meningkat secara signifikan setelah pemukiman kembali bahwa sebelum pemukiman hanya 6% dari penduduk Tanjung Balik memperoleh pendapatan Rp 4,5 juta per bulan, sementara 26% penduduk di Koto Masjid berada pada tingkat pendapatan tersebut. Perbedaan ini dapat dikaitkan dengan pengenalan budidaya ikan di Koto Mesjid: 36% dari penduduk terlibat dalam pembudidayaan ikan sebagai sumber pendapatan sekunder, hanya 4% dari penduduk Tanjung Balik terlibat dalam industri ini. Kewirausahaan penduduk di Koto Masjid telah menyebabkan keberhasilan ekonomi di daerah tersebut.

Studi dampak sosial relokasi Proyek PLTA Koto Panjang yang dilakukan Witrianto (2014) melaporkan bahwa beberapa perubahan yang terjadi seiring perpindahan penduduk ke lokasi pemukiman yang baru di antaranya adalah berubahnya bentuk keluarga yang semula berupa keluarga luas (*extended family*) menjadi keluarga inti (*nuclear family*). Pola pemukiman penduduk yang semula

memanjang di tepi sungai berubah menjadi pola menyebar di atas bukit. Tradisi masyarakat sebagai pendukung budaya sungai pun berubah menjadi masyarakat desa perladangan di atas bukit. Keluarga yang melangsungkan pernikahan di pemukiman baru merupakan kelompok masyarakat yang paling dirugikan dengan adanya pemindahan ke lokasi pemukiman baru, karena mereka tidak mendapat jatah rumah dan lahan pertanian.

Keluarga baru yang terbentuk di pemukiman baru merupakan anak (generasi kedua) dari Kepala Keluarga yang direlokasi. Keluarga baru ini dikenal dengan istilah pecahan KK. Jika di pemukiman lama, setelah menikah mereka bisa memanfaatkan tanah ulayat yang terdiri dari hutan basah (rawa) dan hutan kering untuk dijadikan ladang, di pemukiman baru tidak ada lagi tanah ulayat kaum. Semua lahan yang diperuntukkan untuk lokasi pemindahan warga relokasi sudah dibagikan kepada seluruh warga berdasarkan jumlah KK yang ada. Pecahan KK tidak mendapatkan jatah lahan pertanian. Pemerintah tidak mencadangkan tanah untuk jatah Pecahan KK yang tidak memiliki lahan pertanian atas nama mereka sendiri. Mereka yang berstatus sebagai Pecahan KK menganggap bahwa kebijakan pemerintah kurang bijaksana dan kurang berpikir secara jangka panjang. (Witrianto, 2014).

Bendungan adalah salah satu proyek infrastruktur yang berumur paling panjang, sehingga dampak sosial dapat dipertimbangkan selama seluruh kerangka waktu operasional dari bendungan (misalnya, Takesada (2009) telah mempelajari dampak sosial bendungan Ikawa Jepang 50 tahun setelah pemukiman kembali. Bahkan, bendungan mungkin berjalan selama lebih dari 100 tahun, misalnya pembangunan bendungan Theodor Roosevelt yang masih berfungsi di Arizona yang dibangun 104 tahun yang lalu (SRP, 2015), sedangkan pembangkit listrik tenaga batu bara hanya bisa bertahan selama 30 tahun (Cleetus *et al.*, 2012). Bendungan Koto Panjang telah beroperasi selama 20 tahun. Dampak perpindahan pemukiman akibat pembangunan bendungan Koto Panjang juga dialami oleh generasi kedua pemukim kembali.

Desa Pongkai Istiqomah merupakan salah satu desa pemukiman kembali penduduk di Kecamatan XIII Koto Kampar. Pola pemukiman kembali penduduk di Desa Pongkai Istiqomah adalah pola perpindahan pemukiman bedol desa/pola pindah bebas. Lokasi pemukiman penduduk masih berada di lokasi lahan ulayat mereka. Oleh karena itu penduduk desa ini memberi nama pemukiman baru mereka Desa Pongkai Istiqomah, yang bermakna “teguh pendirian untuk tetap tinggal di tanah ulayat mereka”. Pemukim kembali yang direlokasi ke Desa Pongkai Istiqomah hanya menerima kompensasi uang tunai atas lahan dan tanaman yang terkena genangan air proyek bendungan. Di sisi lain, penduduk yang direlokasi ke Desa Koto Mesjid, mengikuti pola transmigrasi, setiap kepala keluarga memperoleh lahan perkebunan karet 2 ha dan 0,5 ha lahan untuk perumahan dan rumah berdinding kayu ukuran 6x6m² per KK. Kompensasi uang tunai juga diberikan atas lahan dan tanaman yang terkena genangan air proyek bendungan.

Dari uraian latar belakang di atas menunjukkan bahwa telah banyak penelitian dilakukan mengenai perpindahan penduduk karena bendungan dan proyek-proyek pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di mancanegara /negara-negara lain. Namun, studi yang telah dilakukan sebagian besar terfokus pada kepala rumah tangga yang direlokasi akibat pembangunan bendungan. Oleh karena bendungan merupakan proyek infrastruktur yang paling berumur panjang, maka dampak yang ditimbulkan bendungan juga akan dialami oleh generasi kedua pemukim kembali. Sampai saat ini belum ada studi dampak pembangunan bendungan pada kehidupan rumah tangga generasi kedua.

Aktivitas dalam penghidupan berkelanjutan merupakan strategi penghidupan yang berupa pilihan cara penghidupan berdasarkan prioritas dan adanya kesempatan dalam menggunakan aset yang tersedia dan kemampuan untuk mempertahankan atau memperbaiki penghidupan. Setiap individu dapat memiliki strategi penghidupan yang berbeda, tergantung pada aset penghidupan yang tersedia dan kerentanan yang dihadapi. Dalam kondisi keterbatasan ketersediaan sumber daya lahan di lokasi pemukim kembali, bagaimanakah profil akses dan kontrol rumah tangga generasi

kedua terhadap usahatani ? Bagaimanakah penghidupan rumah tangga generasi kedua di Desa Koto Mesjid dan Desa Pongkai Istiqomah ?

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam studi ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah profil akses dan kontrol terhadap usahatani rumah tangga generasi kedua di Desa Koto Mesjid dan di Desa Pongkai Istiqomah?
2. Bagaimanakah tingkat kesejahteraan rumah tangga generasi kedua di Desa Koto Mesjid dan di Desa Pongkai Istiqomah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah mengkaji profil akses dan kontrol terhadap usahatani dalam penghidupan rumah tangga generasi kedua pemukim kembali di Kawasan PLTA Koto Panjang, Provinsi Riau.

Tujuan spesifik penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji profil akses dan kontrol terhadap usahatani rumah tangga generasi kedua di Desa Koto Mesjid dan di Desa Pongkai Istiqomah
2. Mengkaji tingkat kesejahteraan rumah tangga generasi kedua di Desa Koto Masjid dan di Desa Pongkai Istiqomah.

D. Manfaat Penelitian :

Hasil studi ini diharapkan memberikan manfaat :

1. Untuk meningkatkan pengetahuan akademik mengenai kehidupan rumah tangga generasi kedua pemukim kembali dengan memperhatikan aspek gender terkait dengan pemukiman kembali.
2. Untuk menciptakan kesadaran di antara pembuat kebijakan untuk meningkatkan pedoman perencanaan pemukiman kembali di masa depan dengan memperhatikan kesetaraan gender dalam pemberian kompensasi.

E. Kebaruan Penelitian

Penelitian tentang dampak pemindahan penduduk akibat pembangunan bendungan selama ini menganggap penduduk yang dipindahkan sebagai kelompok yang homogen, analisis yang dilakukan mengabaikan aspek gender dalam menyelidiki dampak perpindahan terhadap kehidupan penduduk yang direlokasi. Kekurangan dalam hal aspek gender dalam menyelidiki dampak perpindahan penduduk menyebabkan hasil temuan tidak dapat mengungkapkan ketidakadilan gender yang dialami oleh penduduk yang mengalami perpindahan pemukiman akibat pembangunan. Kajian gender akses dan kontrol terhadap usahatani dalam penghidupan generasi kedua di pemukiman kembali di kawasan PLTA Koto Panjang yang dilakukan dapat menambah pengetahuan tentang aspek gender dari dampak perpindahan penduduk akibat pembangunan. Dalam penelitian ini, pembahasan yang dilakukan difokuskan untuk kedua pihak, yaitu perempuan dan laki-laki secara seimbang tentang akses dan kontrol terhadap usahatani, strategi koping yang mereka lakukan dalam penghidupan mereka di pemukiman kembali, serta tingkat kesejahteraan rumah tangga generasi kedua.

Penelitian tentang dampak perpindahan pemukiman penduduk akibat pembangunan bendungan sejauh ini terfokus pada generasi pertama/rumah tangga yang mengalami relokasi langsung, belum ada studi mengenai dampak pembangunan bendungan terhadap penghidupan generasi kedua setelah 20 tahun bermukim di pemukiman kembali. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang dampak jangka panjang pembangunan bendungan terhadap penghidupan generasi kedua di pemukiman kembali.

Kebaruan pada penelitian ini adalah pada tiga model analisis yaitu : Analisis Gender, Model IRR, dan Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan yang digunakan untuk menyelidiki penghidupan rumah tangga generasi kedua di Desa Koto Mesjid dan Desa Pongkai Istiqomah yang terkena dampak proyek bendungan Koto Panjang.